



ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010-2012

Riswanda Imawan ✉ Agus Wahyudin

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2013
Disetujui Januari 2014
Dipublikasikan Mei 2014

Keywords:

Characteristics of Local Government, Size, Wealth, Leverage, Capital Expenditure, and Regional Financial Independence

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang berupa Ukuran, Wealth, Leverage, dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012 baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Pemda Tahun Anggaran 2010-2012, dengan jumlah sampel sebanyak 42 secara purposive-random sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012 dan data statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel belanja modal dengan arah negatif berpengaruh, Ukuran dan Wealth berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan variabel Ukuran, Wealth, Leverage, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Abstract

The purpose of this study was to determine the influence of the characteristics of local governments in the form of Size, Wealth, Leverage, and Capital Expenditure to financial independence of City/Regency's Government in Central Java on fiscal year 2010-2012 either partially or simultaneously. The population in this study is the City/Regency in Central Java Province consists of 35 Local Government Fiscal Year 2010-2012, with total sample 42 in purposive random sampling. This study uses secondary data in the form of budget realization report the City/Regency in Central Java fiscal year 2010-2012 and statistical data. Based on the results of this study concluded that in partial capital expenditures with negative direction, size and wealth has positive and significant impact on the region's financial independence. Leverage whereas no significant effect on the region's financial independence. Simultaneously variable Size, Wealth, Leverage, and Capital Expenditure significantly influence to local financial independence.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: imawan.riswanda@gmail.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 mengenai “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia” yang merupakan landasan hukum peraturan otonomi daerah dengan mengubah peraturan mengenai kewenangan pengelolaan yang diberikan kepada masing-masing daerah otonom. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada prinsipnya Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan adanya hak otonomi tersebut, pemerintah daerah kedepan diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.

Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni UU No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya (Hadi, 2010). Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. Realita yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang cukup besar.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap dana perimbangan pemerintah pusat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan data laporan dari kementerian keuangan yang menyebutkan bahwa rasio PAD terhadap dana perimbangan rata-rata masih sekitar 15 persen (data terlampir). Data tersebut juga menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2011 memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Dana Perimbangan

pemerintah pusat. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pembiayaan keuangannya dan menunjukkan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah masih rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Darmanto (2012) menunjukkan bahwa *wealth* berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa *wealth* tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), *leverage* tidak berpengaruh secara statistik terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Mengingat hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beda-beda, maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti sekali lagi variabel ukuran, *wealth*, dan *leverage*, terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini peneliti menambah satu variabel yaitu belanja modal dengan harapan dapat menambah keanekaragaman penelitian ukuran, *wealth*, dan *leverage* dalam hubungannya dengan kemandirian keuangan daerah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh ukuran, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan.

Pengaruh Ukuran terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Neraca keuangan terdiri dari tiga unsur yang salah satunya adalah aset dimana merupakan indikator untuk mengetahui ukuran pemerintah daerah. Aset menggambarkan kekayaan daerah yang berupa infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah. Tingginya nilai aset mampu memberikan akses terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai contoh aset daerah yang berupa infrastruktur daerah seperti sarana publik akan mendukung jalannya kegiatan ekonomi dimasyarakat, sehingga mengakibatkan aktivitas perekonomian berjalan dengan baik. Melalui kegiatan ekonomi tersebut

akan menimbulkan pungutan yang masuk ke dalam kas daerah berupa pajak maupun retribusi daerah. Menurut Kusumawardani (2012) pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang merupakan indikator dari kemandirian keuangan daerah. Hadi (2007) menyatakan bahwa Semakin besar total aset yang dimiliki menunjukkan pemerintah daerah akan semakin mudah dalam mendapatkan pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah.

H1 : Ukuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh *Wealth* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kemakmuran dapat dilihat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), semakin tinggi nilai aktivitas produksi dan jasa yang dihasilkan maupun pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Menurut Ladjin (2008) semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi penerimaan daerah tersebut. Kemakmuran sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang berlajalan di daerah tersebut. Semakin tinggi kemakmuran suatu daerah, maka semakin besar pendapatan daerah, semakin besar pendapatan daerah akan memberikan peluang terhadap meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

H2 : *Wealth* berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Leverage merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dan modal, semakin besar hutang yang dimiliki suatu entitas maka semakin rendah kemandirian keuangan entitas tersebut. Menurut Sumarjo (2010) melalui penelitiannya pada sektor publik yang menyatakan semakin besar rasio *leverage* maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya

karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio *leverage* maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Pendapat tersebut mengandung artian bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin buruk tingkat kemandirian keuangannya, pun sebaliknya.

H3 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

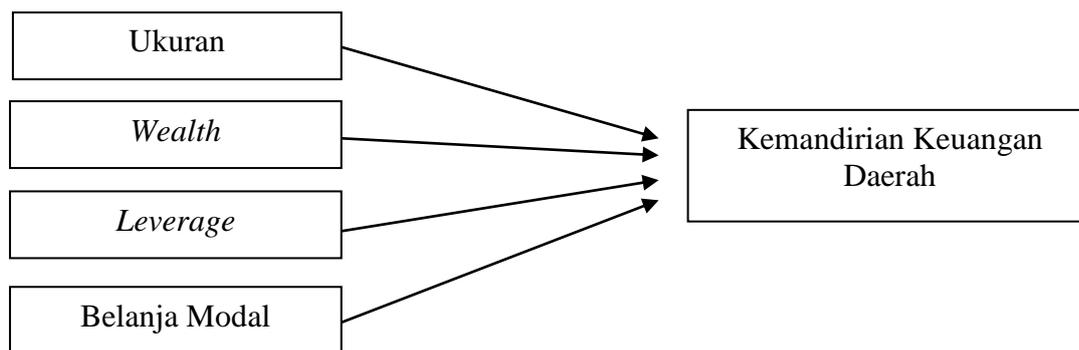
Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas ekonomi yang semakin meningkat, dan dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk menempatkan dana investasinya di daerah tersebut. Hal tersebut mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan faktor utama dari kemandirian keuangan daerah.

H4 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh suatu daerah. Karakteristik yang dimaksud adalah karakteristik keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan penelitian ini yaitu ukuran, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal. Keempat variabel tersebut apabila dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah akan mengakibatkan naiknya pendapatan asli daerah (PAD), dimana PAD merupakan indikator kemandirian keuangan daerah.

H4 :Kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 tahun anggaran 2010-2012. Sampel penelitian berjumlah 42, diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu data LKPD yang tersedia di Setda Jawa Tengah. Data bersumber dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah maupun dari *www.djpk.depkeu.go.id*, serta data statistik BPS.

Variabel Penelitian

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Halim (2007) adalah sebagai berikut:

$$Kemandirian\ Keuangan\ Daerah = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah}$$

Ukuran

Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu obyek. Pengukuran variabel ini diukur dengan total aset dalam suatu periode waktu tertentu. Total aset dapat dilihat dari laporan keuangan bagian

neraca. Total aset dalam LKPD terdiri atas aset lancar, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, deposito, aset tetap, dan dana cadangan.

Wealth

Wealth/kemakmuran salah satunya dapat menggunakan indikator PDRB (Pendapatan Domeestik Regional Bruto) karena dapat digunakan sebagai pengukur kesejahteraan dengan asumsi bahwa semakin besar pendapatan maka semakin besar konsumsi yang berdampak pada PDRB yang meningkat. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Leverage

Leverage dapat diukur dengan *Total Debt to Equity Ratio*, dimana rasio ini menggambarkan tingkat hutang dalam modal ekuitas.

$$Leverage = \frac{Hutang\ (Debt)}{Ekuitas\ (Equity)}$$

Belanja Modal

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.

Belanja Modal = Belanja tanah + Belanja peralatan dan mesin + Belanja gedung dan bangunan + Belanja jalan, irigasi, dan jaringan + Belanja aset tetap lainnya

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan

analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1: Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
KKD	42	.058	.166	.089	.028
UKURAN	42	1.500	6.910	2.652	1.384
WEALTH	42	2.090	1.380	4.379	2.751
LEVERAGE	42	.000	.029	.003	.005
BMODAL	42	.279	2.84	1.396	.657
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014

Hasil analisis deskriptif variabel kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 0,166 pada Kota Surakarta dan terendah sebesar

0,058 pada Kabupaten Banjarnegara, nilai rata-rata untuk variabel dependen kemandirian keuangan daerah sebesar 0,089 dengan standar deviasi sebesar 0,028. Variabel ukuran, nilai aset tertinggi sebesar 6,910 pada Kota Surakarta dan terendah sebesar 1,500 pada Kabupaten Purworejo, nilai rata-rata sebesar 2,652 dengan standar deviasi sebesar 1,384. Variabel *wealth*, tingkat kemakmuran tertinggi sebesar 1,380 pada Kabupaten Kudus dan terendah sebesar 2,090 pada Kota Pekalongan, nilai rata-rata sebesar 4,379 dengan standar deviasi sebesar 2,751. Variabel *leverage*, nilai *leverage* tertinggi sebesar 0,029 pada Kabupaten Grobogan dan terendah sebesar 0,000 pada Kabupaten Wonogiri, nilai rata-rata sebesar 0,003 dengan standar deviasi sebesar 0,005. Variabel belanja modal, nilai belanja modal tertinggi sebesar 2,840 pada Kabupaten Brebes dan terendah sebesar 0,279 pada kabupaten Batang, nilai rata-rata sebesar 1,396 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,657.

Tabel 2: Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.060	.010		5.832	.000
	UKURAN	1.110E-14	.000	.541	4.092	.000
	WEALTH	4.955E-15	.000	.480	3.495	.001
	LEVERAGE	.813	.675	.153	1.205	.236
	BMODAL	-1.756E-13	.000	-.406	-2.805	.008

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Output SPSS

Tabel 3: Uji Statistik F

		ANOVA ^b				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.014	4	.004	6.995	.000 ^a
	Residual	.019	37	.001		
	Total	.033	41			

a. Predictors: (Constant), BMODAL, LEVERAGE, UKURAN, WEALTH

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Output SPSS

Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda, uji t untuk H_1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 4,092 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi untuk variabel Ukuran menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 4,092 > t-tabel sebesar 1,687 serta nilai koefisien menunjukkan tanda positif dan sesuai dengan hipotesis penelitian awal. Jadi, H_1 **diterima** karena terdapat pengaruh positif Ukuran terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Semakin besar total aset yang dimiliki menunjukkan pemerintah daerah akan semakin mudah dalam mendapatkan pendapatan asli daerah. Sebagai contoh aset daerah yang berupa infrastruktur daerah seperti sarana publik akan mendukung jalannya kegiatan ekonomi dimasyarakat, sehingga mengakibatkan aktivitas perekonomian berjalan dengan baik. Melalui kegiatan ekonomi tersebut akan menimbulkan pungutan yang masuk ke dalam kas daerah berupa pajak maupun retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang merupakan indikator dari kemandirian keuangan daerah. Semakin besar total aset yang dimiliki menunjukkan pemerintah daerah akan semakin mudah dalam mendapatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin baik.

Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda, uji t untuk H_2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,495 dengan signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi untuk variabel *Wealth* menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 3,495 > t-tabel sebesar 1,687 serta nilai koefisien menunjukkan tanda positif dan sesuai dengan hipotesis penelitian awal. Jadi, H_2 **diterima** karena terdapat pengaruh positif *Wealth* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemakmuran sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang berjalannya di daerah tersebut. PDRB yang tinggi mengindikasikan kegiatan ekonomi daerah bergeliat dengan baik, dengan begitu jumlah pemasukan pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Banyaknya faktor produksi yang muncul tersebut akan memunculkan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi yang menjadi pemasukan bagi kas daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi akan menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin baik.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda, uji t untuk H_3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 1,205 dengan signifikansi sebesar 0,236. Nilai signifikansi untuk variabel *Leverage* menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 1,205 < t-tabel sebesar 1,687 yang artinya bahwa H_3 **ditolak** sehingga tidak ada

pengaruh yang signifikan *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Argumentasi yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah dilihat dari pembiayaan eksternal. Pembiayaan eksternal yang berupa hutang dalam suatu unit usaha mungkin dapat menjadi tolak ukur kemandirian karena hutang menjadi sumber pendanaan finansial yang patut untuk diperhitungkan. Akan tetapi posisi *leverage* apabila diterapkan pada pemerintah daerah, posisi *leverage* tidak dapat disamakan pada kondisi dari suatu unit usaha karena pembiayaan finansial eksternal pemerintah daerah tidak hanya melalui hutang. Pembiayaan finansial eksternal pemerintah daerah juga berasal dari dana bantuan pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan dimana memiliki nominal yang cukup besar tanpa tanggungjawab pengembalian.

Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda, uji t untuk H_4 diperoleh hasil t-hitung sebesar -2,805 dengan signifikansi sebesar 0,008. Nilai signifikansi untuk variabel Belanja Modal menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), nilai t-hitung -2,805 > t-tabel sebesar 1,687, akan tetapi koefisien bernilai negatif yang artinya bahwa H_4 **ditolak**. Jadi, terdapat pengaruh negatif Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Meningkatnya porsi anggaran belanja modal tidak selamanya diiringi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut diduga karena terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD. Fenomena tersebut disinyalir akan menghambat pembangunan infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah.

Pengujian Hipotesis Kelima

Hasil Uji statistik F untuk menguji pengaruh variabel Ukuran, *Wealth*, *Leverage*, dan Belanja Modal yang mempunyai F-hitung sebesar 6,995 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat diinterpretasikan tingkat signifikansi dibawah 5% ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar 6,995 > F-tabel sebesar 2,69 yang artinya H_5 **diterima**. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. *Wealth* secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan karakteristik pemerintah daerah yang berupa ukuran, *wealth*, *leverage*, dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lain dalam pengukuran variabel *wealth* seperti pendapatan perkapita, dikarenakan besarnya pendapatan perkapita lebih spesifik dalam menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk suatu daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Allah SWT, kedua orang tua tercinta, keluarga besar H. Zaenal Abidin, dosen jurusan akuntansi FE Unnes, teman dan sahabat seperjuangan Akuntansi A-2010, serta almamaterku yang akan selalu aku banggakan. Terimakasih kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan, masukan, kritik dan saran dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Mhd Karya Satya 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. Pengertian dan Indikator Produk Domestik Regional Bruto. <http://www.bps.go.id> diakses pada Desember 2013.
- Bastian, Indra. 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik Modul Untuk Pelatihan Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Baswir, Revrison. 1992. Akuntansi Pemerintah Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Cara-cara untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. www.tutorialkuliahblogger.com (diakses 22 November 2013).
- Data Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012. <http://djpk.go.id>
- Data Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012. <http://djpk.go.id>
- Darwanto dan Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Florida, Asha. 2006. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Gey, Benny and Wim Moesen. 2008. Exploring Sources of local Government Technical Inefficiency: Evidence from Flemish Municipalities. WZB
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomes, Ricardo C and Stephen P. Osborne. 2010. The Role of Stakeholders in Determining Local Government Performance: Evidence from Brazil. Brasil: University of Edinburgh.
- Gujarati. 2003. Dasar-dasar Ekonometrika. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, Waskito. 2010. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Jurnal Riset Akuntansi, Vol: 3 No.1 Januari 2010.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Afri. 2009. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Sarjana FE Universitas Sumatera Utara
- Indriantoro, Nur. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
- Ladjin, Nurjanna. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah. Tesis Magister Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Kawedar, Warsito, dkk. 2008. Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusmuriyanto. 2005. Akuntansi Keuangan Dasar. Semarang: UPT Unnes Press.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Unnes Accounting Analysis Journal.
- Machfoed, Mas'ud. 1994. Financial Ratio Analysis and Prediction of Earning Changes in Indonesia. Kelola Vol 3, No 7.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Principles of Economics. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. 2007. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nordiawan. Deddi, dkk. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan. Deddi, dkk. 2007. Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Perwitasari, Citra. 2010. The Influence of Financial Performance to The Level Accountability Disclosure of Indonesian's Local Government. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Petrovits, Christine, Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Ameer. 2010. The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organisations.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. Pengaruh Ukuran dan PDRB Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

- Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. STIE Indonesia. Jurnal Akuntansi, Vol: 8 No.2 Juni 2012.
- Ryan, Christine, Marc Robinson and Trevor Grigg. 2000. Financial Performance Indicator for Australian Local Government, Accounting Accountability and Performance 6 (2): pp 89-106.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999-2004). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol:1 No.1 2009.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2008. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta. www.bappenas.go.id (diakses pada 15 November 2013).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta. www.bappenas.go.id (diakses pada 15 November 2013).
- Warner, Mildred E. 2000. "Local Government Financial Capacity and The Growing Importance of State Aid". Rural Development Perspectives Vol: 13 No.13.
- Wild, John J, dkk. 2005. Financial Statement Analysis. Jakarta: Salemba Empat.